

UPAYA UNITED NATION WOMEN DALAM MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER DI KENYA

Author: Erna Sari

Hesrina96@gmail.com

Pembimbing: Saiman Pakpahan

Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Riau
Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293
Telp. (0761) 63277, 23430

Abstract

This research discusses gender equality problem in kenya during the new kenya konititusi in 2010. explaining effort UN Women in helping government kenya to realize gender equality. That gender equality remains a problem in many areas, both in the social, economic, educational and even governmental fields.

This research use the perspective of pluralist, Pluralism is a systematic and framework in which there are several groups or parts of other systems and interconnected with the base of mutual respect and respect among peers. The pluralists view international relationships not only as limited to inter-state relations but also relations between individuals and interest groups where the state is not always the main actor and the sole actor

The establishment of UNWOMEN based on the vision of equality contained in the Charter of the United Nations, applies to the elimination of discrimination against women and girls; Women empowerment; and the achievement of equality between women and men as partners and beneficiaries of development, human rights, humanitarian action and peace and security.

Keywords: UNWOMEN, gender equality, constitution of kenya 2010

Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, saat ini para perempuan sudah semakin terlihat keterlibatannya di berbagai bidang, seperti turut mengambil keputusan di bidang politik, mendapatkan kesempatan berdagang dalam bidang ekonomi, mendapatkan pendidikan yang layak bahkan bisa turut andil memberikan pendidikan, serta menerima kesempatan yang sama di bidang kesehatan. Namun di tengah perkembangan ini masih banyak pula terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Contoh kasus yang terjadi, masih banyak pekerja perempuan yang tidak diperhatikan keterampilannya dalam bekerja, hal ini menjadi dampak kurangnya perempuan dalam mendapatkan perlindungan hukum.

Tindak kekerasan terhadap perempuan (violence against women) saat ini menjadi ancaman serius bagi perempuan di seluruh dunia yang merupakan bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kekerasan pada perempuan menurut pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.¹

di negara Kenya, Pemerintah Kenya telah mengambil langkah-

langkah melalui pemberlakuan kerangka kebijakan nasional baru untuk mempromosikan kesetaraan gender. Landasan dari kerangka kerja baru ini adalah Konstitusi Kenya 2010, yang menegaskan kembali kesetaraan bagi semua dan mengamanatkan kuota untuk perwakilan perempuan dalam pemerintahan.² Pada tahun 2011, Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Gender baru, yang merupakan pernyataan kebijakan utama yang menguraikan upaya pemerintah untuk memastikan kesetaraan dan pengarusutamaan gender.

Pada bab 4 Konstitusi Kenya yakni Bill of Rights, Setiap orang sama di depan hukum dan memiliki hak atas perlindungan dan manfaat hukum yang sama. Perempuan dan laki-laki memiliki hak atas perlakuan yang sama, termasuk hak atas kesempatan yang sama di bidang politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Diskriminasi langsung dan tidak langsung dilarang. Negara diharapkan untuk mengambil langkah-langkah legislatif dan lainnya, termasuk program aksi afirmatif dan kebijakan yang dirancang untuk memperbaiki setiap kerugian yang diderita individu atau kelompok karena diskriminasi di masa lalu. Ketentuan lebih lanjut menyatakan: *“di samping langkah-langkah yang dimaksud dalam klausul ... 6 .., Negara harus mengambil langkah-langkah legislatif dan lainnya untuk menerapkan prinsip bahwa tidak lebih dari dua pertiga anggota badan pilihan harus berjenis kelamin sama.”*

¹Definisi Kekerasan terhadap Perempuan. Di unduh dari http://www.k4health.org/sites/default/files/CEDA_W_document.pdf diakses pada 18 November 2017

² Republic of Kenya. (2010). The Constitution of Kenya. Article 27 & 97.

Meskipun adanya langkah-langkah kebijakan dari pemerintah Kenya, kesenjangan gender masih ada untuk perempuan yang merupakan 51% dari populasi di Kenya. Dalam Laporan Kesenjangan Gender Global 2015, Kenya menempati peringkat 48 dari 145 negara, dengan skor 0,719 dengan 1,0 mewakili kesetaraan penuh.³ Dalam Indeks Ketidaksetaraan Gender UNDP 2014, Kenya menduduki peringkat pertama di antara Negara Pembangunan untuk kesetaraan gender. dengan nilai 0,552 dan peringkat keseluruhan 126,⁴ untuk Lembaga Sosial dan Indeks Gender (SIGI), nilai Kenya adalah 0.2157 menempatkannya dalam kategori kesetaraan menengah.⁵ Indeks internasional ini, sambil menunjukkan bahwa Kenya lebih progresif daripada negara-negara Afrika lainnya.

Selain faktor lemahnya hukum yang memihak perempuan, tingkat perekonomian yang rendah serta kebudayaan menyebabkan kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual, pemerkosaan, kekerasan fisik dan pelecehan seksual. Pemberdayaan perempuan terhambat oleh poligami, pernikahan dini dan praktik budaya dan tradisional yang berbahaya seperti pemotongan genital perempuan. Praktik tradisional yang mengatur pewarisan, perolehan tanah dan tunjangan yang diperoleh dari hasil tanah terus menguntungkan laki-laki. Kemampuan perempuan untuk mengakses sistem peradilan dibatasi oleh biaya legal, sistem peradilan tradisional, buta huruf

dan ketidaktahuan akan hak. Perempuan juga terpengaruh secara tidak proporsional oleh HIV / AIDS dengan 6,9% wanita berusia 15 sampai 64 tahun, dibandingkan dengan 4,4% untuk pria pada kelompok usia yang sama.⁶

Setelah adanya konstitusi baru di Kenya, yang mana dalam konstitusi tersebut menginginkan peningkatan kesetaraan gender, akan tetapi adanya beberapa faktor yang menghambat tujuan dari konstitusi Kenya 2010, Maka *UN Women* (*United Nations Women*) organisasi yang resmi bekerja di Kenya pada bulan Juli 2010 dan membawa visi dan misi yaitu untuk membela kesetaraan gender, terutama hak-hak wanita yang berada dibawah kepemimpinan PBB, *UN Women* bergerak khusus untuk emansipasi wanita. *UN Women* di kancah internasional bersifat membantu meringankan penderitaan para wanita yang terdiskriminasi.

Pembentukan UNWOMEN yang didasarkan pada visi kesetaraan yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, berlaku untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan; pemberdayaan perempuan; dan pencapaian kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sebagai mitra dan penerima manfaat pembangunan, hak asasi manusia, tindakan kemanusiaan dan perdamaian dan keamanan. Menempatkan hak-hak perempuan sebagai tugas utama, UNWOMEN akan memimpin dan

³ World Economic Forum. (2015). Global Gender Gap Report: Economies- Kenya. <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=KEN>

⁴ United Nations Development Programme (2014). Human Development Reports, Gender

Inequality Index. <http://hdr.undp.org/en/composite/GII>

⁵ *Ibid*

⁶ <http://africa.unwomen.org/en/where-we-are/eastern-and-southern-africa/kenya> di akses pada tanggal 5 November 2017

mengkoordinasikan upaya sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memastikan bahwa komitmen terhadap kesetaraan jender dan pengarusutamaan gender diterjemahkan ke dalam tindakan di seluruh dunia. Ini akan memberikan kepemimpinan yang kuat dan koheren untuk mendukung prioritas dan upaya negara-negara anggota, membangun kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil dan aktor terkait lainnya.

Perspektif yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu perspektif Pluralist, merupakan suatu sistematika serta kerangka dimana terdapat beberapa kelompok atau bagian dari sistem lainnya dan saling berhubungan dengan basis saling menghargai dan menghormati antar sesama.⁷

Kaum pluralis memandang hubungan internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja tetapi juga merupakan hubungan antar individu dengan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai actor utama dan actor tunggal, terdapat 4 asumsi paradigm pluralisme⁸, yaitu :

1. Actor non negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik pemerintah maupun non-pemerintah, MNCs, kelompok ataupun individu.
2. Negara bukanlah *unitary actor*/ actor tunggal, karena actor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan

negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya actor.

3. Negara bukan actor rasional. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik kompetisi, dan kompromi antar actor didalam negara.
4. Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaku pada power atau national security, tetapi meluas pada masalah-masalah social, ekonomi, dan lainnya.

Penulis melakukan analisis menggunakan tingkat analisa perilaku kelompok. Tingkat analisis ini mengasumsikan bahwa yang menjadi focus utama adalah mempelajari perilaku kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang terlibat di dalam hubungan internasional.⁹

Teori yang penulis gunakan adalah Feminisme. Menurut Rebecca Grant, teori feminisme telah berkembang bersamaan dengan teori Hubungan Internasional pada abad 20 sejak Perang Dunia I dan khususnya sejak adanya gerakan untuk menuntut hak pilih bagi perempuan di Inggris dan di Amerika Serikat. Teori feminisme ini merupakan bentuk kritik atas teori-teori HI terdahulu yang dikatakan merupakan “studi laki-laki”. Selama sepuluh tahun beberapa dekade sebelumnya, teori feminis Hubungan Internasional telah memberi sumbangan tersendiri bagi teoritisasi politik internasional. Kaum feminis melihat bahwa selaman ini dunia internasional mayoritas dipegang oleh kaum maskulin, yaitu laki-laki,

⁷ Diana L. Eck, *what is pluralism*. Di akses dari http://pluralism.org/pages/pluralis/what_is_pluralism/ pada 06 November 2017

⁸ Paul R.viotti dan Mark V. Kauppi. 1998. *International Relations Theory: Realism,*

Pluralism, and Beyond, Boston:Allyn and Bacond, Hlmm. 193

⁹ Patrick Morgan. 1982. *Theories and Approaches to International Politics : What are we Think?* New Brunswick:transaction.

sementara perempuan memiliki pengaruh yang kecil terhadap pengambilan keputusan dalam dunia internasional.

Menurut **Vinsensio Dugis, M.A** Diferensiasi antara laki-laki dan perempuan yang dimaksud dalam gender dan jenis kelamin perlu dibedakan pengertiannya. Dalam gender maskulinitas dan femininitas merupakan hasil dari konstruksi sosial dan bisa diubah berdasarkan waktu dan kultur setempat. Sedangkan dalam pengertian seks perbedaan tersebut disebabkan faktor biologis, pemberian Tuhan atau kodrat dan tidak bisa berubah atau cenderung tetap. Sehingga persepektif feminisme terkait dengan isu gendernya terlahir akibat adanya pengalaman nyata hasil konstruksi aktivitas yang dipengaruhi oleh aspek politis, sosial, dan kultural.¹⁰

Berdasarkan fenomena yang ada, penulis ingin meneliti dan membahas lebih lanjut permasalahan yang terjadi, dengan judul **“Bagaimana Upaya United Women (UNWOMEN) dalam meningkatkan kesetaraan Gender di Kenya?”**

Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui latar belakang dibentuknya United Nation Women (UNWOMEN) sebagai organisasi yang membantu dalam kesetaraan gender.
2. Mengetahui tingkat kekerasan terhadap perempuan dan ketidaksetaraan Gender di Kenya.

3. Mengetahui upaya yang dilakukan UNWOMEN dalam meningkatkan kesetaraan gender di Kenya

Manfaat : Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memperluas wawasan mengenai kesetaraan gender di Kenya dan upaya dari United Nation Women (UNWOMEN) sebagai Organisasi yang berperan di Kenya. Serta menjadi tambahan referensi dalam perkembangan hubungan internasional khususnya kajian kontemporer.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif artinya penulis berusaha menampilkan beberapa fakta yang terjadi dari beberapa sumber yang melalui data yang didapatkan.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengumpulkan bahan dari berbagai sumber, seperti: buku, internet, majalah, jurnal, dan koran. Jenis data yang penulis gunakan yaitu jenis sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan diolah oleh penulis pertamanya dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, internet, maupun buletin yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

UN Women adalah organisasi PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan. Sebagai organisasi global untuk perempuan dan anak perempuan, UN Women didirikan untuk mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan mereka di seluruh dunia. UN Women mendukung Negara-

¹⁰ Dugis, Vinsensio M.A., 2014. Dalam Mata Kuliah Teori Hubungan Internasional SOH201 : *Feminisme dan Gender*. Universitas

Airlangga, FISIP Universitas Airlangga pada 22 Mei.

negara Anggota PBB ketika mereka menetapkan standar global untuk mencapai kesetaraan gender, dan bekerja dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk merancang undang-undang, kebijakan, program dan layanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa standar tersebut diterapkan secara efektif dan benar-benar bermanfaat bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia.¹¹

UN Women selalu memastikan agar isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tetap menjadi perhatian utama. Hal ini penting karena selama puluhan tahun, PBB telah membuat kemajuan signifikan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Termasuk dengan tercapainya beberapa terobosan, antara lain Konvensi Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang disingkat dengan CEDAW.

Setelah Kenya menggunakan konstitusi baru yang progresif berdasarkan hak dan kesetaraan pada tahun 2010, maka, sudah seharusnya UNWOMEN sebagai badan PBB untuk kesetaraan dan hak perempuan ikut membantu mewujudkan visi dan misi yang berdasarkan konstitusi Kenya 2010. Unwomen Kenya memiliki kantor yang terletak di Nairobi ibukota Kenya. Sesuai dengan Konstitusi Kenya 2010 yang memberikan kerangka hukum bagi pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar, dan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan rentan, terutama perempuan dan anak-anak, untuk

menuntut hak-hak mereka. Namun, perempuan masih menghadapi tantangan termasuk kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan di dalam parlemen. Situasi ini diperparah oleh tidak adanya gerakan perempuan yang kredibel dan bersemangat untuk mengadvokasi keuntungan kesetaraan jender.

Masuknya UNWOMEN Kenya untuk mendukung dan mewujudkan konstitusi Kenya 2010 dengan berbagai program seperti berikut:

- Perempuan memimpin dan berpartisipasi dalam pemerintahan
- Perempuan dan pemuda yang diuntungkan secara ekonomi mendapat manfaat dari pengadaan publik dan pertanian serta rantai nilai industri ekstraktif
- Wanita dan gadis hidup bebas dari kekerasan

UN Women Kenya akan bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan program yang responsif gender pada wanita, perdamaian dan keamanan, aksi kemanusiaan dan pengurangan risiko bencana. Kami akan memberikan kepemimpinan teknis kepada badan-badan PBB dan berbagi penelitian dan pengetahuan dengan mitra termasuk organisasi wanita, Palang Merah Kenya, dan berbagai kementerian pemerintah.

Perencanaan nasional dan devolusi sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas untuk komitmen dan prioritas kesetaraan jender. Program ini akan melibatkan pemerintah nasional, organisasi dan jaringan perempuan, dan

¹¹ “About UN Women”, diakses dalam <http://www.unwomen.org/en/about->

[us/about-un-women,](http://www.unwomen.org/en/about-) diakses 5 November 2017

advokasi gender untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran nasional yang responsif gender. Kami juga akan mendukung penguatan kapasitas pemerintah (termasuk pemerintah devolusi) untuk menganalisa, merumuskan dan melaksanakan rencana dan anggaran yang responsif gender.

Pada 27 Agustus 2010, Kenya mengeluarkan dispensasi konstitusi baru. Ini disebut sebagai 'republik kedua'. Itu mengakhiri perjuangan 20 tahun oleh Kenya yang menuntut tatanan konstitusi baru. Ini antara lain membawa pengakuan hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Konstitusi 2010 mengakui martabat, hak ekonomi, sosial dan budaya termasuk hak untuk pendidikan, perumahan dan hak untuk kesehatan termasuk perawatan kesehatan reproduksi. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi ditetapkan sebagai nilai inti kepemimpinan. Nilai - nilai dan prinsip nasional.

Bab empat Konstitusi Kenya adalah Bill of Rights. Setiap orang sama di depan hukum dan memiliki hak atas perlindungan dan manfaat hukum yang sama. Perempuan dan laki-laki memiliki hak atas perlakuan yang sama, termasuk hak atas kesempatan yang sama di bidang politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Diskriminasi langsung dan tidak langsung dilarang. Negara diharapkan untuk mengambil langkah-langkah legislatif dan lainnya, termasuk program aksi afirmatif dan kebijakan yang dirancang untuk memperbaiki setiap kerugian yang diderita individu atau kelompok karena diskriminasi di masa lalu. Ketentuan lebih lanjut menyatakan: “... di samping langkah-langkah yang dimaksud dalam klausul ... 6 .., Negara harus mengambil langkah-langkah legislatif dan lainnya untuk menerapkan

prinsip bahwa tidak lebih dari dua pertiga anggota badan pilihan harus berjenis kelamin sama.”

Selain mendapatkan hak dalam bidang hukum, terdapat beberapa hak lain untuk perempuan dari Konstitusi 2010 meliputi:

- Kesetaraan dalam kepemimpinan dengan 33% sebagai massa kritis lebih disukai untuk kepemimpinan perempuan
- Kesetaraan dalam pernikahan
- Kesetaraan dalam pekerjaan
- Kesetaraan dalam akses ke pendidikan
- Semua praktik adat yang diskriminatif dilarang
- Properti matrimonial dilindungi
- Hak perempuan atas warisan dan memiliki tanah dijamin
- Tanggung jawab orang tua yang sama
- Persyaratan untuk entitas publik dan swasta untuk mematuhi prinsip-prinsip inklusi dan gender

Mengukur status sosial perempuan dapat menjadi kompleks, bukan hanya karena ketidaksetaraan gender bersifat multidimensional, tetapi juga karena diskriminasi terjadi di lebih dari satu lembaga sosial dan di berbagai usia, lokasi, dan budaya perempuan. Memahami posisi perempuan dalam konteks budaya lokal dan institusi sosial adalah kunci untuk menentukan status sosial perempuan, dan konteks sosiokultural ini digunakan sebagai penentu indeks ketidaksetaraan gender internasional. Indikator status sosial menunjukkan kemajuan untuk memastikan hak-hak dan persamaan perempuan dibuat secara komparatif antar negara.

Ketidaksetaraan dalam bidang Sosial

- a. Hak dalam pernikahan,
- b. pengurusan anak,

- c. tenaga kerja anak, dan
- d. sebagai kepala rumah tangga.

Ketidaksetaraan dalam bidang kesehatan

Kenya telah membuat kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan akses ke layanan kesehatan, karena memperkuat sektor kesehatan adalah salah satu sektor utama dari rencana pembangunan jangka panjang negara yang terdapat pada Visi 2030. Sementara target kesehatan sebelumnya dalam Rencana Jangka Menengah Visi 2030 dipandu oleh tiga Tujuan Pembangunan Milenium (MDG), yaitu pengurangan angka kematian bayi dan anak, pengurangan kematian ibu dan memerangi HIV / AIDS, TB, malaria dan penyakit lainnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menawarkan jendela peluang baru untuk memperluas tindakan ke masalah kesehatan lainnya sebagaimana ditentukan dalam tujuan ketiga, “memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan dengan baik - untuk semua usia.”

Indikator status kesehatan mencerminkan tantangan yang dihadapi sektor kesehatan di Kenya, termasuk staf kesehatan yang tidak memadai, pendanaan rendah, dan infrastruktur yang tidak memadai dan rapuh, yang tidak dapat memberikan layanan medis dan kesehatan masyarakat yang dibutuhkan oleh penduduk. Terlepas dari ketentuan dalam Konstitusi baru Kenya bahwa setiap orang memiliki hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, yang mencakup hak atas layanan perawatan kesehatan dan perawatan kesehatan reproduksi, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan

tetap serendah 5% dari produk nasional bruto. (PDB) dan sekitar 12% dari total pengeluarannya untuk layanan sosial.¹²

Ketidaksetaraan dalam bidang Ekonomi

Partisipasi dan peluang ekonomi merupakan indikator kunci dari pemberdayaan dan partisipasi perempuan dalam ekonomi pengetahuan suatu negara. Menurut Global Gender Gap Report 2015, Kenya menempati peringkat 25 dari 145 dengan skor 0,778 dalam partisipasi dan peluang ekonomi, yang berarti bahwa perempuan memiliki lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan yang produktif. Namun, kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi bervariasi berdasarkan pendidikan para wanita, jenis pekerjaan yang mereka terlibat. Ada sejumlah besar wanita yang aktif terlibat dalam ekonomi, tetapi kebanyakan ini ditemukan di sektor informal dan di dalam sektor pertanian pada tingkat subsisten, yang tidak dicakup dalam statistik ketenagakerjaan formal.

Kerjasama UNWOMEN dan Pemerintah Kenya Bergabungnya Kenya pada program kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan yang berada pada program UN, menjadi hubungan timbal balik yang menyatukan 3 kementerian Kenya dan 14 organisasi PBB dalam satu kerangka kerja. Sebelum bergabung pada program ini, pemerintah Kenya memiliki program mengenai peningkatan hak asasi manusia yang bekerjasama dengan kedutaan besar Swedia di Kenya.

Program kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan di Kenya yang

¹² Republic of Kenya. (2010). The Constitution of Kenya. Article 43.

di tugaskan kepada UN Women dan kedutaan besar Swedia di Kenya. Kedua organisasi ini melakukan evaluasi yang mana untuk dijadikan pelajaran dan sebagai rekomendasi. Sebuah kelompok referensi di bentuk untuk melakukan evaluasi dan juga memastikan evaluasi mengadopsi pendekatan partisipatif.

Proses evaluasi ini memakan waktu selama 30 hari kerja, yang terbagi dari rentang waktu akhir desember 2011 hingga maret 2012. lebih dari 20 organisasi mitra kerja yang mengikuti pelatihan evaluasi ini, dan mengunjungi sekitar 150 lokasi yang berpotensi untuk mengikuti kerangka kerja program ini.

UN Women (United Nations Women) organisasi yang resmi bekerja di Kenya dan membawa visi dan misi yaitu untuk membela kesetaraan gender, terutama hak-hak wanita yang berada dibawah kepemimpinan PBB, *UN Women* bergerak khusus untuk emansipasi wanita. Masuknya UNWOMEN di Kenya untuk mendukung dan mewujudkan konstitusi Kenya 2010 dengan berbagai program seperti berikut

- Perempuan memimpin dan berpartisipasi dalam pemerintahan
- Perempuan dan pemuda yang diuntungkan secara ekonomi mendapat manfaat dari pengadaan publik dan pertanian serta rantai nilai industri ekstraktif
- Wanita dan gadis hidup bebas dari kekerasan

UN Women Kenya akan bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan program yang responsif gender pada wanita, perdamaian dan keamanan, aksi kemanusiaan dan pengurangan risiko bencana. Kami akan memberikan kepemimpinan teknis kepada badan-

badan PBB dan berbagi penelitian dan pengetahuan dengan mitra termasuk organisasi wanita, Palang Merah Kenya, dan berbagai kementerian pemerintah.

Program ini merupakan Upaya dari UN Women terhadap ketidaksetaraan gender di Kenya, yang berfokus terhadap berbagai bidang. Berjalannya program ini terfokus menjadi beberapa sasaran dilihat dari tingkat pendidikan dan ekonomi. Masing-masing program dari UN Women telah berdampak terhadap kemajuan wanita disana, dilihat dari partisipasi politik, peningkatan ekonomi terhadap perempuan, dan kebebasan perempuan dari kekerasan gender baik fisik maupun diskriminasi hak.

Masuknya UNWOMEN yang mulai resmi bekerja di Kenya pada tahun 2010, membawa visi dan misi yaitu untuk membela kesetaraan gender terutama hak-hak wanita yang berada di bawah kepemimpinan PBB. Membantu mempercepat tujuan Konstitusi Kenya untuk mempromosikan kesetaraan jender dan kesetaraan secara umum dan untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan resolusi yang akan dijalankan UN Women.

Kesimpulan

Terlibatnya UNWOMEN dalam meningkatkan kesetaraan gender di Kenya, membantu mempercepat tujuan pemerintah Kenya yang mana sesuai dengan konstitusi Kenya 2010, mengabdikan kesetaraan sebagai salah satu “ nilai-nilai penting” yang diuraikan lebih lanjut dalam pasal 27. Kerjasama yang baik antara UNWOMEN dan Pemerintah Kenya dalam meningkatkan program yang

responsive terhadap gender membuat peningkatan yang lebih baik di segala bidang. Mulai dari kesetaraan dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan dan didalam pemerintahan sekalipun. Dampak dari program kesetaraan gender ini tidak hanya di rasakan perempuan dari kalangan atas atau pendidikan, ini juga berdampak bagi perempuan yang memiliki ekonomi rendah atau kurang pendidikan, bisa dilihat beberapa peningkatan yang terjadi pada perempuan Kenya setelah berjalannya program UNwomen dan pemerintah kenya sebagai upaya meningkatkan kesetaraan gender di kenya, sesuai dengan program UN Women dan kerjasama pemerintah Kenya.

Partisipasi Perempuan dalam Pemerintahan

Banyak kebijakan dan kerangka kerja legislative menjadi semakin sensitive terhadap gender pada tahun 2016 di Kenya. Undang-undang Amandemen Pemilu (2016) sekarang mengandung unsur-unsur yang meningkatkan inklusi perempuan. Undang-undang Amandemen Partisipasi Politik (2016) memiliki persyaratan bagi partai politik sebagai institusi untuk memasukkan perempuan dalam kepemimpinan. Ini memiliki pedoman nominasi yang akan memastikan partai politik mematuhi inklusi, dan memiliki peraturan keuangan politik dengan insentif untuk pihak-pihak yang meningkatkan inklusi perempuan. Reformasi juga diperkenalkan kepada Komisi Pemilihan dan Bounder Independen dan Kantor Panitia Partai Politik: yang pertama menghasilkan kebijakan inklusi, sementara yang kedua menciptakan kurikulum pelatihan gender dan inklusi yang digunakan untuk melatih partai politik tentang inklusi.

Meningkatkan Perekonomian Perempuan Kenya. UN Women berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran di antara bisnis yang dimiliki oleh perempuan, pemuda, dan penyandang cacat tentang peluang

pengadaan pemerintah dan membangun kapasitas mereka dalam tender. Selain berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran peluang bisnis yang dimiliki perempuan, UN Women juga melakukan beberapa kegiatan lain untuk meningkatkan perekonomian perempuan di Kenya.

Membebaskan Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender UN Women terus bekerja menuju lingkungan legislatif dan kebijakan yang semakin mendukung, sejalan dengan standar internasional untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Sepuluh Komite Kekerasan Berbasis Gender dibentuk di sepuluh kabupaten pada tahun 2016. Dalam menjalankan program pembebasan perempuan dari kekerasan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- L. Muthoni Wanyeki (October 2004). *"The African Women's Development and Communication Network (FEMNET): Experiences of Feminist Continental Organising"*. *Feminist Africa*. Retrieved 2011-09-23.
- Patrick Morgan. 1982. *Theories and Approaches to International Politics : What are we Think?* New Brunswick:transaction.
- Ridhana Swastika Chresna. 2007. *Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Di Wilayah Shan Myanmar pada 1996-2001*.

Buku :
Arivia. Gadis. *Feminisme: sebuah kata hati*. Jakarta. 2006. Penerbit Buku Kompas

Bruchill, Scott. *Theories of International Relations (third edition)*. 2005. New York: Palgrave

Bruchill Scott dan Andrew Linklater. *Theories of International Relation*. 2009. New York: ST. Martin's Press, INC

Clive Archer. *International Organization*. 1983. London : George Allen and Unwin Publisher

Jaggar. *A Feminist Politics And Human Nature*. 1983. Sussex, Harvester Press

Mohtar. Mas'ood. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta. 1990:LP3ES

Website :

<http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=557&crd=404>

http://afrobarometer.org/sites/default/files/mediabriefing/kenya/ken_r7_presentation1_%20gender_equality.pdf.

World Health Organization. Health Topics: Reproductive Health. http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/

World Bank (2015). Mortality Rate, Under-5 (per 1,000). <http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT>

<https://id.tradingeconomics.com/kenya/gdp-growth-annual>

<http://id.reingex.com/Kenya-Business-Economy.shtml>

<http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>